

ABSTRAK

FORMULASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh:

MUHAMMAD ANDHIKA RENALDI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya regulasi dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung, Indonesia. Dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, khususnya rajungan, yang berkontribusi tinggi terhadap ekspor perikanan, diperlukan langkah-langkah pengelolaan yang bijak untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya tersebut. Latar belakang penelitian ini mencakup pengakuan bahwa ruang yang mencakup daratan, perairan, dan udara tidak dapat dikelola secara sembarangan. Pengaturan ruang yang jelas dan bertanggung jawab sangat penting untuk menciptakan wilayah yang aman dan berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa masalah krusial, seperti alih fungsi sistem mangrove, abrasi pantai, dan konflik antar masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan. Melalui wawancara dengan narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Walhi Lampung, penelitian ini menemukan bahwa perlunya regulasi yang mengatur hak masyarakat terhadap sumber daya alam pesisir agar dapat dinikmati secara adil dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pembatasan zona pemanfaatan, zona konservasi, dan zona perlindungan untuk melindungi kampung-kampung nelayan dan ekosistem pesisir yang rentan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam formulasi kebijakan penataan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung, serta menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Formulasi, Penataan ruang, Pesisir, Pulau-pulau kecil.

ABSTRACT

FORMULATION OF POLICY ON COASTAL SPATIAL ARRANGEMENT AND SMALL ISLANDS IN LAMPUNG PROVINCE

By:

MUHAMMAD ANDHIKA RENALDI

This research aims to analyze the importance of regulation in coastal and small island management in Lampung Province, Indonesia. With the increasing exploitation of natural resources, particularly blue swimming crabs, which contribute significantly to fisheries exports, wise management measures are needed to prevent environmental damage and ensure the sustainability of these resources. The background of this research includes the recognition that space, which includes land, water, and air, cannot be managed carelessly. Clear and responsible spatial planning is essential to create a safe and sustainable region, in line with regional autonomy policies. This research also identifies several crucial issues, such as the conversion of mangrove systems, coastal abrasion, and conflicts between communities caused by mining activities. Through interviews with informants from the Maritime and Fisheries Agency and Walhi Lampung, this research finds that regulation is needed to govern community rights to coastal natural resources so that they can be enjoyed fairly and sustainably. Additionally, this research emphasizes the importance of limiting utilization zones, conservation zones, and protection zones to protect fishing villages and vulnerable coastal ecosystems. The results of this research are expected to contribute thought and knowledge to Public Administration studies, particularly in the formulation of coastal and small island spatial planning policies in Lampung Province, and serve as a basis for better decision-making in natural resource management in the region.

Keywords: Formulation, Spatial planning, Coastal, Small islands.